



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62 / 1824 / LUHADUVOK / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Whistleblowing (perlindungan Pengaduan)

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan</li><li>- Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar,</li><li>- Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan,</li><li>- Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan,</li><li>- Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran.</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila penanganan whistleblowing tidak sesuai dengan SOP, maka akan mengakibatkan pengaduan melalui whistleblowing tidak terselesaikan dengan baik dan mungkin pemohon kecewa	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

### Whistleblowing (Perlindungan Pengaduan)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas PMPTSP Jabar	Koordinator Urusan Pengaduan dan Advokasi	Analisis Hukum	Sekretaris Dinas PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) yang dilindungi identitasnya, beserta bukti-bukti yang mendukung pelanggaran di bidang perizinan.					Form Pengaduan; Map; Buku Penerimaan Laporan Pengaduan	1 Jam	Berkas Pengaduan dan bukti-bukti pelanggaran.	
2	Pelapor Pelanggaran adalah PNS di lingkungan DPMPTSP Jabar atau pihak yang dirugikan atau masyarakat yang mengetahui pelanggaran dan dilindungi identitas pengadunya.					Berkas Pengaduan dan pelanggaran		Berkas Pengaduan dan bukti-bukti pelanggaran.	
3	Mendelegasikan kewenangannya sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan					Berkas Pengaduan dan pelanggaran	1 Jam	Berkas Pengaduan dan bukti-bukti pelanggaran.	
4	Mengelompokkan jenis pelanggaran dan melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Analisis Hukum sebagai Tim Advokasi.					Berkas Pengaduan dan pelanggaran		Berkas Pengaduan dan bukti-bukti pelanggaran.	
5	Menerima berkas pengaduan yang dilindungi identitasnya (Whistleblower) dan dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran serta memberikan rekomendasi					Berkas Pengaduan dan pelanggaran	1 Hari	Berkas Pengaduan dan bukti-bukti pelanggaran.	
6	Menindaklanjuti hasil rekomendasi, berupa penjatihan hukuman disiplin dan pengembalian kerugian Negara atau melaporkan kepada pihak Kepolisian.					Berkas Pengaduan dan pelanggaran	30 Menit	Rekomendasi	
7	Melaporkan hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran.					Laporan	2 Jam	Laporan	
8	Menyampaikan hasil penyelidikan kepada Whistleblower.					Laporan	10 Menit	Laporan	